

**EFEKTIVITAS MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2011-2015**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RESTAMI MILANA

NIM.10500112066

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 01 Juni 2015

Penyusun

RESTAMI MILANA

NIM : 10500112066



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusunan skripsi Saudara Restami Milana, NIM: 10500112066, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Januari 2016

Pembimbing I



Dr. Marilang, SH., M.Hum

NIP : 196212311993031024

Pembimbing II



Dr. Muhammad Thahir Maloko, M.HI

NIP : 196312311995031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015", yang disusun oleh Restami Milana, NIM: 10500112066, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Gowa, 29 Februari 2016 M.
20 Jumadil Awal 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Istiqamah, SH., MH	(.....)
Munaqisy II	: St. Nuriannah, SH., MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, SH., M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muhammad Thahir Maloko, M.HI	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan judul : ***“Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015”***.

Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penyusun jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rampungnya karya tulis ini penyusun persembahkan untuk Ibundaku tercinta, ***Rahmah, SE*** dan Ayahanda ***Muallim, SE*** atas doa, dukungan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada hentinya, yang akan mengantarkan penyusun pada kesuksesan. Semua kesuksesan yang telah kuraih dan insya Allah akan kuraih kupersembahkan untuk kalian.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materiil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penyusun, melalui pengantar skripsi ini secara khusus penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada ***Bapak Dr. Marilang, SH., M.Hum dan Bapak Dr. Muhammad Thahir Maloko, M.HI*** yang senantiasa, meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun hingga rampungnya penyusunan skripsi ini.

Dari lubuk hati penyusun yang paling dalam dikhaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si** atas segala perhatian yang diberikan kepada penyusun selama menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag** dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Para Dosen Penguji **Ibu Istiqamah, SH., MH** dan **Ibu St. Nurjannah, SH., MH**, atas semua masukan ilmu yang berharga untuk penyusun.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa mendidik penyusun sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf dan jajarannya.
7. Saudaraku **Reski Mangkawani, S.Si**, semoga Allah selalu memberikan kesuksesan dan kebahagiaan tiada henti untuk kita.
8. Untuk teman seperjuanganku **Susi Hardianti, Nugraha Hasan** dan **Andi Haris Ashary Abdillah** yang selama ini menjadi tempat berbagi suka dan dukaku.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, **Surya Ramadhani Syarif, Siti Sarah, Muflika Nur Hajar Aswad, Nurfajryanti Ramadhani, Alfridha Haulaini** (TaDiRiSaNuSi).
10. Segenap keluarga besar mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

11. Teman-teman KKN Profesi Instansi Pengadilan Tinggi Makassar Angkatan VI
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan segala keterbatasan, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif penyusun sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu hukum perdata.

Akhir kata *Alhamdulillah Rabbil Alamin*.

Gowa, Februari 2016

Penyusun

Restami Milana



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-32
A. Pengertian Mediasi	11
B. Dasar Hukum Mediasi	13
C. Tujuan dan Keuntungan Mediasi	16
D. Prosedur Mediasi	18
E. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi	24
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi	28
G. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	34

D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37-54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Kota Makassar	37
2. Pengadilan Negeri Makassar	39
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar	40
C. Kekuatan Hukum Putusan perkara Perdata Melalui Mediasi	43
1. <i>In Kracht Van Gewijsde</i> (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)	47
2. Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi	48
3. Tidak Ada Upaya Hukum Lain	48
4. Dapat di Eksekusi	49
D. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar	50
1. Hakim Mediator	51
2. Para Pihak	53
3. Advokat	54
BAB V PENUTUP	57-61
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011	45
Tabel 2 Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012	46
Tabel 3 Data Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2013-2015	46



ABSTRAK

Nama : Restami Milana

Nim : 10500112066

Judul : Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015

Skripsi ini berjudul "*Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015*". Dimana dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) sub masalah yakni (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar?, (2) Bagaimana kekuatan hukum putusan perkara perdata melalui mediasi?, (3) Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar?. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai prosedurnya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. (2) Putusan dari proses mediasi itu sendiri adalah *In Kracht* yang dimana sama dengan putusan pengadilan lainnya tetapi dalam prosesnya bisa langsung melakukan eksekusi. (3) Faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dari para pihak, kurang aktifnya mediator dan tidak adanya dukungan advokat itu sendiri.

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Diperlukan adanya sosialisasi / penyuluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai serta pengembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang mediasi. (2) Dengan adanya putusan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dalam mediasi maka tidak ada pihak yang dirugikan. (3) Pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan mediasi di pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana ke tahap yang lebih besar dan kompleks. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum)¹. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Pasal 28D huruf 1 UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*). Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah instansi

¹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1 (Bandung: Alumni, 2000), h. 16.

resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi pengadilan yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim.²

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhi tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Dimana pihak-pihak dipertemukan di ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan. Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.³

Praktik mediasi lebih jelas lagi apabila mencermati kasus-kasus perselisihan, percekocan, dan petengkaran (*syiqaq*) dalam lingkup kehidupan keluarga yang secara tekstual dinyatakan dalam QS an-Nisā'/4: 128. Teknis mengenai proses mediasi dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS al-Nisā'/4: 128 sebagai berikut:

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002) h. 304.

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBg, yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada PERMA poin (b) yang menjelaskan :

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).”

Namun, dalam kenyataannya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar hanya beberapa yang bisa berhasil melalui mediasi dan kebanyakan yang gagal dan menempuh proses persidangan yang di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 99.

Perma tersebut mengatur bahwa apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁵

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni PERMA Nomor 02 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.⁶

Lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian

⁵Ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008.

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 310.

melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.⁷

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa, dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.⁸ Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, sehingga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.⁹

Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 mengenai Jenis Perkara yang di Mediasi:

“Kecuali Perkara yang diselesaikan melalui prosedur niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah

⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 311.

⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 34-35.

⁹Maria S.W. Sumarjono. Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan* (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4.

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).¹⁰

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penyusun dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah pada efektivitas mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “Efektivitas” berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “*effective*” yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda “*effectief*” memiliki makna “berdaya guna”. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif ini dapat diartikan sebagai ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya dan sebagainya); manjur, mujarab, mempan.¹¹ Kata efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud, berarti

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 374.

mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.¹²

Kata “Mediasi” merupakan suatu proses yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.¹³ Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat / perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata “Penyelesaian” adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai-bagai arti seperti pembersihan, pemecahan.

Kata “Perkara” adalah masalah, persoalan, urusan, peristiwa, kejadian.¹⁴ Maksudnya dari perkara adalah semua peristiwa yang melanggar hukum yang meliputi masalah hukum privat atau hukum perdata. Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak.¹⁵

Kata “Perdata” adalah segala sengketa yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar yang berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis perkara perdata lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penyusun merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

¹²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62.

¹³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

¹⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum Edisi Baru* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007), h. 465 .

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 16.

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan perkara perdata melalui mediasi?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” yang disusun oleh Intan Atiqoh.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan mediasi dan efektivitasnya dalam perkara perceraian. Skripsi ini lebih memaparkan gambaran umum tentang perceraian dan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jika dalam mediasi perkara perceraian terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian karena pada dasarnya perkara perceraian berbeda dengan perkara perdata lainnya.

Skripsi yang disusun oleh Fanny Dwi Lestari dengan judul “Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di

¹⁶Intan Atiqoh, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mdiiasi di Pengadilan)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Pengadilan Negeri Medan)”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.

Nurnaningsih Amriana dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Beliau memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi dengan meletakkan utama pada mediasi. Kemudian membahas mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut pula mengenai potensi pengembangannya serta analisis PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan hambatan penerapannya. Sedangkan penyusun membahas pada wilayah peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di pengadilan.

Susanti Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Dalam buku ini menguraikan mengenai prinsip-prinsip mediasi, proses mediasi, teknik-teknik dalam bernegosiasi. Sedangkan dalam skripsi ini membahas pada persoalan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.
 - b. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan perkara perdata melalui mediasi.

¹⁷Fanny Dwi Lestari, “Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013).

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:
- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, yang berhubungan dengan efektivitas PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata terutama untuk menekan jumlah permohonan perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung.
 - b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdata melalui mediasi, bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan sebagai bahan masukan bagi pembuat dan untuk penyempurnaan aturan-aturan tentang mediasi. Serta sebagai salah satu bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada cara lain dalam penyelesaian suatu sengketa perdata selain melalui cara litigasi, yaitu mediasi dimana ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Mediasi

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan (Susanti A.N, 2007: 1).

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral (Mohammad Jamin, 1995: 32).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator (Muchammad Zainudin, 2008: 1).

Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.¹

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus

¹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³ Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 176.

M. Yahya Harahap secara lebih spesifik menjelaskan apa yang dimaksud mediasi sebagai berikut:⁴

- 1) Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antar pihak yang berperkara;
- 2) Perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan, berfungsi sebagai pembantu atau penolong (*helper*).

Berdasarkan uraian-uraian dari peraturan maupun pendapat para ahli, maka dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, adanya pihak ketiga yang bersifat netral (mediator) yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu, mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung dan yang terakhir mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

B. Dasar Hukum Mediasi

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya

⁴M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 244.

diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).⁵ Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah swt dalam QS al-Hujurāt/49: 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikalah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁶

Dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

- Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya “perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Ibnu Hibban dan Tirmuzi)”.

Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadits di atas bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar keislaman. Untuk pencapaian dan perwujudan

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 151.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 516.

perdamaian, sama sekali tidak dibenarkan mengubah ketentuan hukum yang sudah tegas di dalam islam. Orang-orang islam yang terlibat di dalam perdamaian mesti mencermati agar kesepakatan perdamaian tidak berisikan hal-hal yang mengarah kepada pemutarbalikan hukum yang halal menjadi haram atau sebaliknya.

- Hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa Abu Syuraih menerangkan kepada Rasulullah saw bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua pihak, mendengar itu Nabipun berkata "alangkah baiknya".

- Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (*Court Connected Mediation*)

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 01 Tahun 2008).

Penggunaan prosedur mediasi wajib, ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBg menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menyatakan bahwa dalam setiap perkara perdata, jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.⁷

C. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
2. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
3. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses

⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 85.

mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).⁸

Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.⁹

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan/manfaat antara lain:¹⁰

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 24.

⁹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 85.

¹⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

D. Prosedur Mediasi

Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung berlangsung Nomor 01 Tahun 2008 pada bab III pasal 13 tentang penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi

Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yaitu :

1. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut Tegugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para

pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

2. Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketa. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- (1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.
- (2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum.
- (3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
- (4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.
- (5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.

Kovach (Kimberlee K Kovach dalam Suyud Margono, 2004: 64) membagi proses mediasi ke dalam 9 tahapan berikut :

- a. Penataan atau pengaturan awal;
- b. Pengantar atau pembukuan oleh meditor;
- c. Pernyataan pembukan oleh para pihak;
- d. Pengumpulan informasi;

- e. Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus;
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- g. Melakukan tawar-menawar;
- h. Kesepakatan;
- i. Penutupan.

3. Hakim Tunggal

Ketentuan mediasi di pengadilan yang berlaku saat ini mengacu pada PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna mengoptimalkan peran mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Pasal 1 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan:

“Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata” (Pasal 1 ayat 3 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

“Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian” (Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

Mediator dalam proses mediasi mempunyai peran yang cukup krusial dan penting dalam keberhasilan sebuah mediasi, walaupun memiliki keterbatasan, yaitu tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Menurut Pasal 1 butir 6 dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

- a) Netral;
- b) Membantu para pihak;
- c) Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasa dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.¹¹

Menurut Howard Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang, yakni dari sisi peran yang terlemah hingga peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut:¹²

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi rapat;
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
4. Pengendali emosi para pihak;
5. Pendorong pihak/berunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

¹¹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 120.

¹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62.

Adapun Fungsi mediator dalam sebuah mediasi menurut Fuller adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Katalisator yaitu mampu mendorong lahirnya suasana ruang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak.
2. Sebagai pendidik dimana dia harus berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai penerjemah maksudnya adalah harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai narasumber yaitu harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyangkal berita jelek, yang dimaksudkan disini adalah harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersifat emosional.
6. Sebagai agen realitas, dimana harus mampu memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak bahwa, sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
7. Sebagai kambing hitam maksudnya adalah harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

4. Musyawarah

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau

musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.

Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

E. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Suatu putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sehingga

bukan tidak mungkin bahwa salah satu pihak yang bersengketa akan dirugikan karena gugatannya dikalahkan oleh hakim.

Di dalam literatur belanda, dikenal istilah *vonnis* dan *gewijsde*. Yang dimaksud dengan *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga tersedia upaya hukum khusus.

1. *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)

Kesepakatan mediasi akan berkekuatan hukum tetap setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan dibuat putusan hakim. Kesepakatan dengan akta perdamaian dibuat oleh notaris dan merupakan akta otentik yakni akta yang mempunyai kekuatan sempurna sehingga apabila ternyata salah satu pihak ingkar / wanprestasi, maka pihak yang lainnya dapat meminta apa yang telah diperjanjikan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan hukum yang melekat pada mediasi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila sudah ada akta perdamaian. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan jika tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada ketua pengadilan.¹³

Dalam pasal 1851 KUH perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

¹³Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 87.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian adalah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*). Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR ayat (2), akta perdamaian yang dibuat di persidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan sejajar antara akta perdamaian dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membawa konsekuensi hukum terhadap akta perdamaian itu sendiri. Konsekuensi tersebut yaitu apabila salah satu pihak ingkar untuk melaksanakan isi yang telah dirumuskan dalam akta perdamaian, maka pihak lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan. Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, menyebut dengan istilah: “mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan”. Hal ini ditegaskan dalam 130 ayat (2) HIR, mempergunakan istilah: “berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.¹⁴ Selain kedua pasal di atas tidak sama persis bunyi kalimatnya, namun maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian umum bahwa putusan

¹⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 302.

perdamaian serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*)”.¹⁵

2. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*) Kekuatan mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubung dengan tujuan acara perdata, yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk menentukan hukum menguasai soal yang menjadi perkara itu. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau di adili, hal ini mengandung pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak.

3. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian (*Bewijsende Kracht*) Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan

¹⁵M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 303.

banding, kasasi dan pelaksanaannya. Pengaturan kekuatan pembuktian dalam putusan pidana (Pasal 1918 dan 1919 BW) mengatur sebagai putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan kekuatan pembuktiannya mengikat (Pasal 1918 BW) dan apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian (Pasal 1919 BW). Kalau kekuatan pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, maka kekuatan putusan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diserahkan kepada pertimbangan hakim.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Para Pihak

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya dalam kasus perkara perdata (perceraian), kondisi social seseorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Faktor moral dan kerohanian dari para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

c. Itikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Hakim

Kurangnya pemahaman oleh hakim tentang mediasi karena belum tersosialisasi dengan baik.

b. Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. Sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi.

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak dilatar-belakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dari sebuah mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar-belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inperson* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya.

c. Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator dalam

memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa.

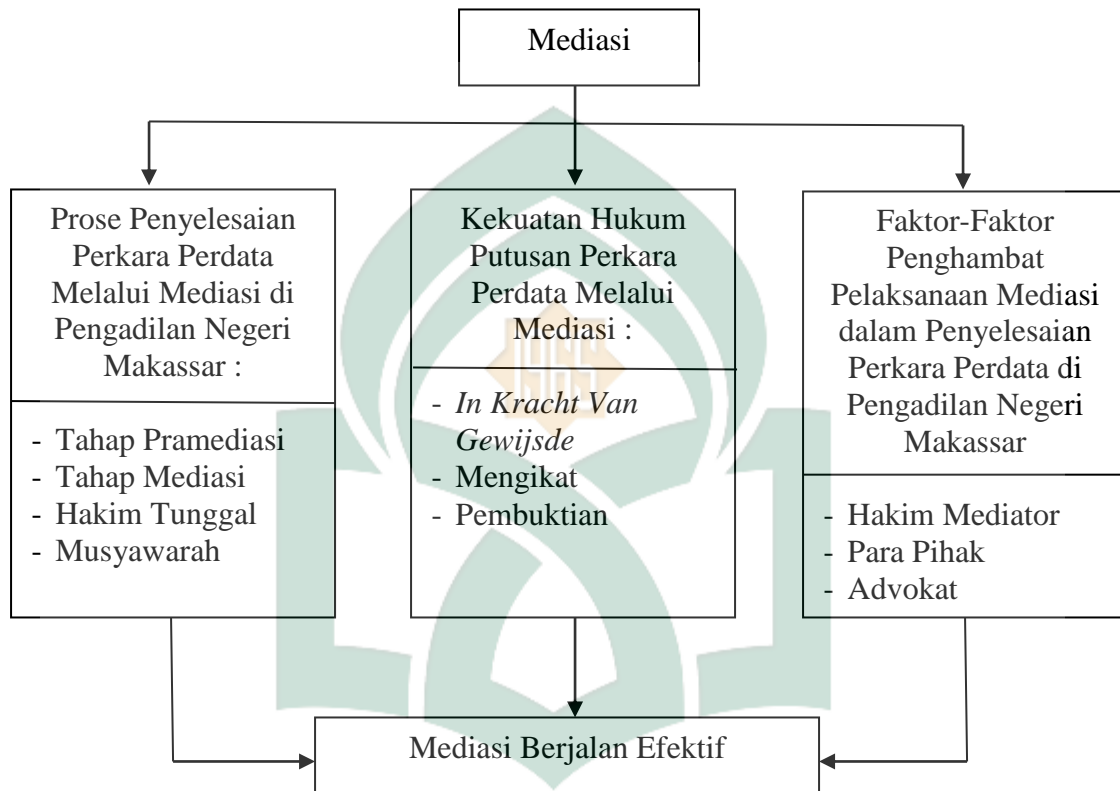
d. Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Bahwa advokat / kuasa hukum kurang memberi dukungan kepada kliennya untuk niat berdamai maupun kepada mediator, cenderung menghendaki bila sidang atau proses dilanjutkan. Para pengacara harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugasnya itu adalah demi kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, klien maupun korpsnya.¹⁶

¹⁶Victor M. Situmorang, *Perdamiaan dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 26.

G. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai efektivitas PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2011-2015. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian:

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penyusunan skripsi ini, maka penyusun melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tempat diselenggarakannya mediasi di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama di kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis empiris* berarti

penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* berarti mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yang merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan Indonesia.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti¹ yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penyusunan skripsi ini. Data primer juga diperoleh langsung dari sumber utama.²
2. Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi³ yakni data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan:⁴
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵ berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.

²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 57.

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 392.

⁵Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.⁶
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan KBBI.⁷

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.
2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁸ Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Makassar serta Advokat.
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁹ Tujuan observasi/pengamatan terutama

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

⁷Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 100.

membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut.¹⁰ Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2011-2015.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah:

1. Daftar pertanyaan;
2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas;
3. Alat rekam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka¹¹. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dapat dijadikan pedoman untuk tercapainya efektivitas lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.

¹⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 70.

¹¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Makassar

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masjid di Makassar (1910-1934).

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari

kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.¹

Visi misi Kota Makassar sebagai identitas wilayah pembangunan, disusun dengan pemahaman bahwa, Visi merupakan gambaran atau cita cita kesuksesan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab segenap unsur dan pelaku pembangunan itu sendiri, termasuk dari masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan.²

a. Visi yakni “Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lora Bangun Kota Dunia”.

b. Misi antara lain :

1. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia;
2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia ;
3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi.

¹Pemerintah Kota Makassar, “Sejarah Kota Makassar”, *Official Website Pemerintah Kota Makassar*, <http://www.makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html> (19 Desember 2015).

²Pemerintah Kota Makassar, “Profil Pimpinan”, *Official Website Pemerintah Kota Makassar*, <http://www.makassarkota.go.id/profilpimpinan.html> (19 Desember 2015).

2. Pengadilan Negeri Makassar

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24' BT - 5° 8' 90,7" LS.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kartini;

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Amanagappa;

Sebelah barat berbatasan dengan gedung Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut catatan sejarah, bangunan tersebut didirikan pada tahun 1915 dengan nama *Raad ban Justitia*. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu *Juliana Weg* di utara (sekarang jalan Kartini), *Hospital Weg* di timur (sekarang jalan Sudirman), *Justitia Laan* di selatan (sekarang jalan Amanagappa).

Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Mendupar pada tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni *Raad ban Justitia*, merupakan pengadilan untuk orang-orang Cina, dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan *Landraad* yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, letaknya di bagian selatan bangunan.³

³Pengadilan Negeri Makassar, "Sejarah Pengadilan Negeri Makassar", Official Website Pengadilan Negeri Makassar, <http://pn-makassar.go.id/Sejarah.html> (19 Desember 2015).

B. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar

Prosedur pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri berdasarkan proses beracara menurut HIR sangatlah panjang walaupun Pasal 4 ayat (2) UUKK menghendaki penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Begitu pun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang menghimbau untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari.

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar menggunakan sistem *court connected mediation*. Penerapan mediasi di lembaga peradilan tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Maka sebelum dilakukan proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Mediasi dipandang sebagai bagian dari proses perkara karena dilakukan pada awal proses persidangan. Untuk mengkonkritkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, maka mediasi dilakukan pada awal proses persidangan yang apabila sengketa selesai secara damai maka akan dibuatkan akta perdamaian dan proses pemeriksaan perkara berakhir dengan pengukuhan perdamaian tersebut oleh hakim. Sebaliknya apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai, maka proses pemeriksaan persidangan akan berlanjut sesuai tahap tahapan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari jawab menjawab hingga putusan yang bersifat *win lose solution*.

Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Pada tahapan proses mediasi sangat penting untuk dihadirkan pihak materiil. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja ditambah 14 hari

kerja atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal dibuatkan berita acara oleh Mediator, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi: *“pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.*
- b. Advokat atau akademisi hukum*
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa*
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara*
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.*

Pada umumnya seluruh Mediator yang dimaksud pada Pasal tersebut dapat menjadi Mediator di Pengadilan. Namun, dari penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Makassar hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator. Penunjukan hakim mediator di Pengadilan Negeri Makassar oleh Ketua Pengadilan berdasarkan dari Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri Makassar.

Pada tahap mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, dimana para pihak dihadirkan sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar. Pada Proses Mediasi tersebut, Mediator berperan aktif menjadi seorang fasilitator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Mediator di Pengadilan Negeri Makassar biasa juga melakukan kaukus yakni pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak berperkara tanpa diketahui oleh pihak lawan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2008.

Pelaksanaan mediasi maksimal 14 hari ditambah 14 hari sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama

40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 40 hari.

Dalam tahap mediasi, mediator mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara tentang keinginan yang diharapkan dari para pihak secara terbuka dan jujur. Dimana mediator menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian” (Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2008).

Mediasi melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan para kehendak dan kemauan para pihak.⁴ Mediator di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan tahap mediasi juga memberitahukan kepada para pihak yang melalui proses mediasi tentang keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah, hasil yang dicapai melalui mediasi lebih memuaskan semua pihak.⁵

⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2002), h. 91.

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 176..

Apabila tahap mediasi berhasil akan dibuatkan akta perdamaian yang dimana akta perdamaian tersebut bisa dibuat oleh pihak yang berperkara atau akta perdamaian dari pengadilan, akta perdamaian tersebut dibacakan di persidangan oleh majelis hakim.⁶ Akta perdamaian yang dibuat diluar campur tangan pengadilan dibolehkan, karena undang-undang tidak melarang membuat persetujuan berbentuk akta perdamaian.⁷ Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 18 ayat (2) bahwa: “*Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku*”.

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ext aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitif.⁸

Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar sudah sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Kekuatan Hukum Putusan Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar

Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁶Suparman Nyompa (50 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2015.

⁷M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 301.

⁸Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34.

(1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 10 ayat (2).

Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum.

Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai.

Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepakatan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator

membuatkan akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditanda tangani oleh kedua para pihak.

Tabel 1 Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perceraian	89	7	7,86%	82	92,13%
2	Perbuatan Melawan Hukum	63	2	3,17%	61	96,83%
3	Tanah	40	1	2,5%	39	97,5%
4	Wanprestasi	20	2	10%	18	90%
5	Utang Piutang	10	2	20%	8	80%
6	Harta Bersama	3	2	66,6%	1	33,33%
7	Kewarisan	2	2	100%	0	0%
Jumlah		243	19	7,82%	224	92,18%

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015

Tabel 2 Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012

No	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perceraian	96	8	8,33%	88	91,66%
2	Perbuatan Melawan Hukum	67	2	2,98%	65	97,02%
3	Tanah	49	1	2,04%	48	98,86%
4	Wanprestasi	18	2	11,11%	16	88,89%
5	Utang Piutang	4	2	50%	2	50%
6	Harta Bersama	1	1	100%	0	0%
7	Kewarisan	3	1	33,33%	2	66,67%

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2015

**Tabel 3 Data Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun 2013-2015**

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	CABUT	DAMAI	PUTUS	BANDING	KET
1	2013	131	29	4	69	29	-
2	2014	377	53	8	245	71	-
3	2015	387	93	10	235	49	-
JUMLAH		895	175	22	549	149	-

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Tahun 2015

Kekuatan dari putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam Sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan.⁹ Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa).

Hal ini berarti apabila hasil dari suatu mediasi tidak di buatkan suatu akta perdamaian, maka salah satu pihak tersebut jelas tidak mau melaksanakannya dengan sukarela. Oleh sebab itu, mediator di Pengadilan Negeri Makassar mengupayakan dan mendorong agar para pihak yang bersengketa yang akhirnya sepakat untuk bersama, maka hasil perdamaian tersebut dicatat dalam akta

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 160.

perdamaian dan kemudian dilakukan suatu tindakan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan suatu hasil kesepakatan dengan sukarela, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini tentu sangat merugikan para pihak tersebut, dan ternyata tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan bisa jadi gugatan yang akan diajukan nanti tidak diterima di dalam Pengadilan Negeri manapun juga.

2. Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan.

Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Negeri Makassar apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Makassar.

3. Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.

Karena Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹⁰

Hal ini berarti dalam pokok perkara, para pihak yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak ada upaya hukum lain.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR bahwa terhadap perdamaian (putusan perdamaian) tidak diizinkan banding.¹¹ Sejak semula terhadap putusan perdamaian tidak diperbolehkan mengajukan banding, karena pada saat putusan perdamaian terwujud, sudah melekat nilai kekuatan hukum seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk derden verset atau bisa berbentuk partai verset.¹³

4. Dapat di Eksekusi

Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang di sepakati

¹⁰Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 87.

¹¹O Bidara dan Martin P. Bidara, *Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI Tentang Hukum Acara Perdata* (Cet Kedua; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2012), h. 24.

¹²M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 303.

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 161.

secara sukarela.¹⁴ Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang.

Dalam putusan perdamaian, bukan saja kekuatan hukum mengikat yang melekat pada putusan perdamaian, namun sekaligus kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak enggan melaksanakannya “secara sukarela” (*vrijwillig*), pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, supaya pihak yang ingkar dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian dan jika perlu dapat diminta bantuan kekuasaan umum (kepolisian).¹⁵

D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Hasil penelitian dan observasi yang penyusun lakukan di tempat yang menjadi *pilot project* pelaksanaan mediasi di pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Makassar, menunjukan bahwa proses perdamaian terutama mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai seringkali mengalami kegagalan. Penyusun menemukan beberapa faktor penghambat yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering gagal (*deadlock*). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar antara lain:

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 162.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 304.

1. Hakim Mediator

Ketentuan mengenai pengertian mediator dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 diakomodasi dalam Pasal 1 butir (6) yang menyatakan “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Dari ketentuan PERMA dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator menjadi pihak yang netral yang tidak boleh memihak salah satu pihak, apabila pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa. Ketersediaan mediator di pengadilan sangat membantu suksesnya penerapan mediasi.

Adapun mediator di Pengadilan Negeri Makassar umumnya adalah hakim di instansi tersebut. Mediator di Pengadilan Negeri Makassar hanya beberapa yang telah mendapatkan sertifikat sebagai mediator walaupun telah mengikuti pelatihan. Jadi untuk memenuhi ketersediaan mediator hakim maka Ketua Pengadilan Makassar yang mengangkat beberapa hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator. Sangat penting untuk seorang hakim mediator mengikuti pembekalan mengenai mediasi selain untuk menjalankan amanat dari Pasal 5 ayat (1) PERMA,

karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan (*skill*) melalui pembekalan khusus mengenai mediasi.

Dengan mengikuti pembekalan mengenai mediasi diharapkan mereka akan lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan keuntungan lain mereka lebih memahami mengenai seluk beluk proses mediasi yang benar, baik itu dari menjelaskan kepada klien mengenai keuntungan dari mediasi sampai dengan teknik bermediasi yang baik. Hal ini dikarenakan mediator yang telah menjalani pelatihan mediator sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana mereka diberi pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik, serta panduan untuk melakukan mediasi yang baik dan benar. Sehingga ketersediaan mediator yang telah mengikuti pembekalan mengenai mediasi akan semakin memperbesar keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri.

Tetapi dalam pengamatan penyusun, ada juga beberapa mediator yang berasal dari hakim yang dimana dalam tahap mediasi cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim di persidangan bukan sebagai mediator yang dimana hakim tersebut tidak memahami tugas dan fungsi dari mediator itu sendiri. Sebagian mediator yang berasal dari hakim terkadang melontarkan ucapan yang pesimistik terhadap pelaksanaan mediasi. Disamping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Dari hasil pengamatan penyusun bahwa, belum ada mediator nonhakim yang pernah memediasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Jadi, jika mediasi ingin segera terlaksana dan berjalan dengan baik serta dapat selesai tepat waktu dengan memperoleh hasil yang maksimal, maka hendaklah para pihak yang bersengketa untuk lebih perhatian dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan hadir dalam pertemuan mediasi.¹⁶

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri Makassar dilatar belakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi.

Selain itu, faktor-faktor dari para pihak yakni kurangnya kesadaran dan sikap kejujuran yang dimana kadangkala terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak yang bersengketa, ketika masing-masing pihak menghendaki keinginannya yang didengar dan dituruti oleh pihak lawannya. Sebuah proses mediasi untuk bisa mencari jalan keluar dengan hasil sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) sangat membutuhkan kejujuran dari para pihak, tanpa kejujuran dari mereka upaya mediasi akan sulit mencapai titik terang karena permasalahan yang sebenarnya tidak diketahui. Kejujuran para pihak ini memudahkan mediator untuk menganalisa permasalahan apa yang sebenarnya terjadi.

¹⁶Suparman Nyompa (50 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2015.

3. Advokat

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam Pasal 14-20 Undang-Undang Advokat.¹⁷

Kedudukan Advokat sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah (*officium nobile*) maka advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum.¹⁸ Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat.

Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) advokat mengajukan atau membela kliennya.¹⁹

Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta hukum dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas,

¹⁷Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 74.

¹⁸Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 159.

¹⁹Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 28.

mandiri, dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting.²⁰ Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dimana dalam tahap mediasi ada advokat yang pro dan ada pula yang kontra. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Advokat yang kontra terhadap proses mediasi beranggapan bahwa menjalankan proses mediasi hanya sekedar formalitas saja. Hal ini dikarenakan semakin lama advokat menjadi kuasa hukum para kliennya semakin banyak pula pemasukan yang mereka dapatkan. Berbeda dari pendapat para advokat yang pro mediasi yang mengatakan bahwa seorang advokat akan lebih memilih perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian karena putusannya *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang.

Tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatar-belakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata. Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang banyak dari kliennya.²¹

Keengganan advokat dalam mendorong pihak kliennya untuk berdamai dengan menggunakan lembaga mediasi sebenarnya menghambat upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi.

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa keberhasilan sebuah mediasi terkait erat dengan peran serta dari para advokat, jika para advokat serius untuk

²⁰Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 160.

²¹Suparman Nyompa (50 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Desember 2015.

menggunakan proses mediasi di pengadilan, maka prosedur mediasi di pengadilan akan lebih besar tingkat keberhasilannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah di bahas oleh penyusun diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim.
2. Kekuatan hukum putusan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dimana kekuatan hukumnya itu sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan persidangan. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut :
 - a) *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap);
 - b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi;
 - c) Dapat dieksekusi;
 - d) Tidak ada upaya hukum lain.
3. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar adalah para pihak yang bersengketa yang

tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian.

B. Implikasi

Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai serta pengembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang mediasi.
2. Dengan adanya putusan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dalam mediasi maka tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan mediasi di pengadilan terutama para advokat dan hakim-hakim Pengadilan Negeri serta keseriusan dari para mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Advokat sebagai kuasa hukum pencari keadilan harus mencerminkan sikap dan perilaku dengan tidak hanya mengejar kemenangan daripada keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Online atau Internet

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Adi Nugroho, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- , *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2004.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bidara, O dan Martin P. Bidara. *Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI Tentang Hukum Acara Perdata*. Cet Kedua; Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II; Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Jamin, Mohammad. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1995.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Situmorang, Victor. *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Social*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Pemerintah Kota Makassar. "Sejarah Kota Makassar". *Official Website Pemerintah Kota Makassar*. <http://www.makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html> (19 Desember 2015).
- Pengadilan Negeri Makassar. "Sejarah Pengadilan Negeri Makassar", *Official Website Pengadilan Negeri Makassar*. <http://pn-makassar.go.id/Sejarah.html> (19 Desember 2015).
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumarjono, Maria S.W, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Edisi 1 Cet 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Skripsi dan Tesis

Atiqoh, Intan. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”.

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Lestari, Fanny Dwi. “Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”, *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Zainudin, Muchammad. “Hukum dalam Mediasi.” *Tesis*, Surabaya: Universitas Erlangga, 2008.

C. Peraturan-Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / RBg.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Restami Milana, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Juni 1994 dari pasangan suami isteri Muallim, SE dan Rahmah, SE. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pertama kali melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2000 di SD Inpres Mangga Tiga lalu berpindah ke SD Inpres Kassi Makassar tahun 2000-2006. Kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan SMPN 08 Makassar tahun 2006-2009. Kemudian penyusun melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMAN 05 Makassar tahun 2009-2012. Kemudian setelah tamat, penyusun memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu, selanjutnya dengan memilih Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum terhitung mulai tahun 2012-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R